

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya perang dunia kedua, membawa dampak perubahan perekonomian dunia yang besar, dengan muncul dan bangkitnya negara-negara industri serta berdirinya negara merdeka yang baru, semua negara melakukan pembangunan perekonomiannya, perdagangan internasional semakin pesat, diikuti dengan mobilitas modal internasional yang semakin tinggi dan luas. (Mundell, 1963, dikutip oleh Edy rahmantyo T, Desember 2005, Hal: 206-226).

Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang penting dalam perekonomian suatu negara, selain sektor swasta dan rumah tangga. Disamping pemerintah memang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian, karena pemerintah mempunyai aparat keamanan dan hukum. Pemerintah dirasa perlu campur tangan dalam masalah perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak mungkin ada bila pemerintah tidak ambil bagian didalamnya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan yang tertuang dalam UUD 1945 dan pancasila, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual.

Untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan yang memerlukan dana investasi yang sangat besar agar pembiayaan proyek-proyek pembangunan sesuai dengan prioritas sektor dapat dipenuhi. Jumlah dana

investasi yang sangat besar dipenuhi baik dari sumber dana dalam negeri maupun sumber dana dari luar negeri. Sumber dana dari luar negeri antara lain dapat diperoleh dengan cara menghimpun dana dari masyarakat (tabungan masyarakat) dan tabungan pemerintah, dimana tabungan pemerintah adalah merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, sedangkan sumber dana dari luar negeri diperoleh dari penanaman modal asing dan hutang luar negeri .

Hutang luar negeri yang diterima selama ini berkaitan erat dengan adanya keterbatasan dana dalam negeri yang dapat dihimpun untuk membiayai pembangunan yang telah direncanakan. Pada hakekatnya hutang luar negeri mempunyai peranan sebagai alternatif sumber pembiayaan tambahan ketika negara tengah berada dalam kesulitan untuk membiayai anggaran belanjanya dan sebagai arus modal masuk yang sangat diperlukan untuk mencapai tingkat pembangunan yang cukup tinggi .

Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu bangsa, yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita, sementara kebijaksanaan pembangunan ekonomi di indonesia selalu berlandaskan pada trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah melakukan kegiatan ekonomi, agar kegiatan ekonomi pemerintah tersebut terkendalikan dengan baik dari segi penerimaan maupun dari segi pengeluaran maka sebuah anggaran (*budget*) harus disusun sebelum pemerintah melakukan kegiatannya dan merupakan alat kontrol kegiatan yang dilakukan pemerintah. Untuk mengetahui besar kecilnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kita tidak perlu melihat secara fisik kegiatan apa dan berapa besarnya, melainkan kita dapat melihatnya melalui anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).

Di dalam negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan ekonomi adalah merupakan salah satu cara untuk mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara maju lainnya. Pada umumnya negara-negara yang sedang berkembang selalu menghadapi kendala yang tidak berujung pangkal atau biasa disebut dengan lingkaran terus menerus yang tidak ada putusnya (*vicious circle*), dimana kelangkaan sumber dana disebabkan oleh rendahnya tabungan. Rendahnya tabungan disebabkan oleh rendahnya pendapatan, sedangkan pendapatan rendahnya dipengaruhi oleh rendahnya produktifitas dan keterbatasan dana, dimana rendahnya produktifitas dan keterbatasan dana karena disebabkan rendahnya investasi, dan seterusnya. (Irawan, Suparmoko, 1992, hlm.27).

Jika dilihat dari struktur pembiayaan anggaran pembangunan, hutang luar negeri merupakan salah satu komponen anggaran pembangunan disamping

tabungan pemerintah, mengenai sumber pembiayaan anggaran pembangunan pada periode 1981 – 2003 dapat di ketahui melalui dalam tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1
Sumber Pembiayaan Anggaran Pembangunan

Tahun Anggaran	Anggaran Pembangunan (miliar RP)	Tabungan Pemerintah %	Pinjaman Luar Negeri %
1980/1981	5.504,4	79.7	20.3
1981/1982	6.778,0	77.0	23.0
1982/1983	7.412,5	73.0	27.0
1983/1984	8.694,6	70.8	29.2
1984/1985	8.306,1	78.6	21.4
1985/1986	11.762,5	76.0	24.0
1986/1987	9.181,6	40.0	60.0
1987/1988	9.945,7	44.1	55.9
1988/1989	12.603,2	19.7	80.3
1989/1990	15.499,3	46.2	53.8
1990/1991	21.453,4	61.0	39.0
1991/1992	23.504,1	57.6	42.4
1992/1993	26.355,1	57.9	42.1
1993/1994	26.575,7	59.6	40.4
1994/1995	32.182,8	69.4	30.6
1995/1996	31.587,7	71.4	28.6
1996/1997	36.969,3	67.9	32.1
1997/1998	47.394,6	69.6	30.4
1998/1999	67.244,0	24.1	75.9
1999/2000	80.080,3	39.6	60.1
2000/2001	84.951	41.5	58.5
2001/2002	88.060	42.6	57.4
2002/2003	895.60	40.2	59.8

Sumber: Nota Keuangan dari berbagai tahun penerbitan

Melihat hasil data diatas menunjukkan bahwa sumber dana bagi pembiayaan pembangunan sektor pemerintah dalam negeri lebih besar dari pada pinjaman dari luar negeri yang lebih kecil peranannya. Namun dalam periode antara tahun 1986/1987-1990 peranan pinjaman luar negeri lebih mendominasi terhadap pembangunan di Indonesia dan pada periode antara 1998/1999-2003 pinjaman luar negeri persinya juga lebih besar terhadap tabungan pemerintah.

B. Perumusan Masalah

Sejak awal pembangunan, Indonesia dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain adalah adanya keterbatasan dana pembangunan, juga sumber dana nasional. Oleh karena itu sebagai alternatif pelengkap dana pembangunan adalah melalui hutang luar negeri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini, permasalahan akan dibatasi pada perumusan masalah berikut :

1. Apakah investasi, pengeluaran pembangunan pemerintah, kurs dan laju inflasi dapat mempengaruhi besarnya hutang luar negeri pemerintah Indonesia periode 1981-2004 ?
2. Seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap hutang luar negeri pemerintah Indonesia periode 1981-2004 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi, pengeluaran pembangunan pemerintah, kurs dan laju inflasi terhadap hutang luar negeri pemerintah Indonesia .
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel – variabel tersebut terhadap hutang luar negeri pemerintah Indonesia .

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh adalah :

1. Bagi penulis dapat memperoleh tambahan pengetahuan dari dunia praktisi yang berharga untuk di sinkronkan dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah .
2. Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bidang ekonomi pembangunan dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian lain .
3. Bagi masyarakat maupun instansi pemerintah dan non pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi .